



EKONOMI INDONESIA

Pertumbuhan, Keadilan, dan Kepercayaan Publik

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Mengapa topik ini penting?

Kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan. Ekonomi yang kuat harus dibangun di atas keadilan dalam distribusi dan kepercayaan publik terhadap tata kelola.



Tantangan Strategis



Gejolak global



Harga energi dan pangan



Ketimpangan akses ekonomi



Produktivitas yang belum merata



Perubahan teknologi dan AI

Arah Kebijakan



1
Pertumbuhan berbasis produktivitas



2
APBN yang efektif dan tepat sasaran



3
Penguatan UMKM dan kelas menengah



4
Investasi pada pendidikan dan kesehatan



5
Reformasi tata kelola dan antikorupsi



6
Transformasi digital yang inklusif



Pesan Utama

Ekonomi Indonesia akan kokoh jika pertumbuhan dipadukan dengan keadilan sosial dan kepercayaan publik. Kinerja ekonomi yang baik harus dirasakan luas, dikelola transparan, dan diarahkan bagi kesejahteraan rakyat.



*Rudy C Tarumingkeng: Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan, Keadilan, dan
Kepercayaan Publik*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

24 Juni 2026

EKONOMI INDONESIA: PERTUMBUHAN, KEADILAN, DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Abstrak

Ekonomi Indonesia sering dipuji karena kemampuannya mempertahankan pertumbuhan sekitar 5% di tengah ketidakpastian global, gejolak harga energi, perubahan suku bunga internasional, dan tekanan geopolitik. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi daripada 5,03% pada 2024; pada triwulan I 2026, ekonomi tumbuh 5,61% secara tahunan, didukung terutama oleh permintaan domestik, konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Namun pertumbuhan ekonomi tidak dapat dinilai hanya dari angka PDB. Pertumbuhan perlu dibaca bersama pertanyaan tentang keadilan dan kepercayaan publik: apakah hasil pertumbuhan dirasakan luas oleh rakyat, apakah lapangan kerja yang tercipta berkualitas, apakah ketimpangan akses ekonomi menurun, apakah APBN dikelola kredibel, dan apakah masyarakat percaya bahwa kebijakan ekonomi dijalankan untuk kepentingan umum.

Artikel ini membahas ekonomi Indonesia melalui tiga pilar analisis: **pertumbuhan, keadilan, dan kepercayaan publik**. Pertumbuhan menunjukkan kapasitas ekonomi menghasilkan output, pekerjaan, investasi, dan pendapatan. Keadilan menunjukkan bagaimana hasil pertumbuhan didistribusikan dan apakah rakyat memiliki akses setara

terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, modal, infrastruktur, serta perlindungan sosial. Kepercayaan publik menunjukkan legitimasi kebijakan ekonomi: apakah negara dipercaya, apakah data dipercaya, apakah hukum dipercaya, apakah APBN dipercaya, dan apakah masyarakat yakin bahwa arah pembangunan tidak dikuasai oleh kepentingan sempit.

Data sosial-ekonomi menunjukkan kemajuan yang penting tetapi belum cukup. BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,25% pada September 2025, atau sekitar 23,36 juta orang; Gini Ratio turun menjadi 0,363 pada September 2025; dan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat 4,68%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Namun angka-angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas kesejahteraan. Indonesia masih menghadapi masalah ketimpangan wilayah, kerentanan kelas menengah, pekerjaan informal, akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, ketergantungan komoditas, beban subsidi energi, kualitas belanja publik, serta tantangan tata kelola.

Artikel ini berargumen bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak cukup ditentukan oleh kemampuan mencapai pertumbuhan tinggi, tetapi oleh kemampuan membangun **pertumbuhan yang adil dan dipercaya**. Pertumbuhan tanpa keadilan akan menciptakan ketegangan sosial. Keadilan tanpa pertumbuhan akan sulit dibiayai. Pertumbuhan dan keadilan tanpa kepercayaan publik akan kehilangan legitimasi. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan strategi pembangunan yang menggabungkan produktivitas, pemerataan, tata kelola yang baik, transparansi fiskal, reformasi subsidi, investasi pada manusia, penguatan UMKM, hilirisasi yang berkelanjutan, serta kepercayaan antara negara dan warga.

Kata kunci: ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, kepercayaan publik, APBN, kemiskinan, ketimpangan, produktivitas, tata kelola, pembangunan inklusif.

1. Pendahuluan

Ekonomi Indonesia berada dalam posisi yang menarik sekaligus menantang. Di satu sisi, Indonesia merupakan salah satu ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, memiliki pasar domestik besar, sumber daya alam strategis, populasi produktif, dan kapasitas konsumsi rumah tangga yang kuat. Dalam berbagai krisis global, ekonomi Indonesia terbukti relatif tangguh. Setelah pandemi COVID-19, Indonesia mampu kembali ke pola pertumbuhan sekitar 5% per tahun. Pada 2025, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%, lebih tinggi daripada 5,03% pada 2024. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sisi lain, pertumbuhan Indonesia masih menghadapi pertanyaan kualitas. Apakah pertumbuhan itu didorong oleh produktivitas atau terutama oleh konsumsi dan belanja pemerintah? Apakah pertumbuhan menghasilkan pekerjaan berkualitas atau memperluas pekerjaan informal? Apakah pertumbuhan memperkuat kelas menengah atau justru meninggalkan kelompok rentan? Apakah pertumbuhan mengurangi ketimpangan wilayah atau memperbesar konsentrasi ekonomi di pusat-pusat tertentu? Apakah pertumbuhan memperkuat kepercayaan publik atau justru memunculkan kecurigaan terhadap arah kebijakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena ekonomi bukan hanya soal angka. Ekonomi adalah pengalaman hidup rakyat. Bagi rumah tangga miskin, ekonomi berarti kemampuan membeli beras, membayar sekolah, berobat, dan memperoleh pekerjaan. Bagi kelas menengah, ekonomi berarti kepastian pendapatan, cicilan rumah, biaya pendidikan anak, layanan kesehatan, dan rasa aman menghadapi masa depan. Bagi UMKM, ekonomi berarti akses modal, pasar, perizinan, teknologi, dan perlindungan dari persaingan tidak sehat. Bagi investor, ekonomi berarti kepastian hukum, stabilitas kebijakan, infrastruktur, dan iklim usaha. Bagi negara, ekonomi berarti kemampuan membiayai pembangunan, menjaga fiskal, dan membangun legitimasi.

Karena itu, artikel ini menempatkan ekonomi Indonesia dalam tiga dimensi yang saling berkaitan: **pertumbuhan, keadilan, dan kepercayaan publik**. Pertumbuhan diperlukan karena tanpa pertumbuhan, negara sulit menciptakan pekerjaan, menaikkan pendapatan, dan membiayai layanan publik. Keadilan diperlukan karena pertumbuhan yang hanya dinikmati kelompok tertentu akan memperdalam ketimpangan dan melemahkan kohesi sosial. Kepercayaan publik diperlukan karena kebijakan ekonomi tidak akan efektif bila masyarakat, pelaku usaha, dan investor meragukan arah, integritas, dan konsistensi negara.

Dalam konteks 2026, tantangan ekonomi Indonesia semakin kompleks. Pada triwulan I 2026, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi 5,61% secara tahunan, dengan belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong penting. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) World Bank juga mencatat bahwa Indonesia memasuki 2026 dengan momentum pertumbuhan kuat yang terutama digerakkan oleh permintaan domestik. ([Open Knowledge Repository](#)) Namun, OECD memperkirakan pertumbuhan Indonesia 2026 sekitar 4,7% dan 5,0% pada 2027, serta memperingatkan tekanan dari biaya energi, biaya pinjaman, subsidi bahan bakar, dan ketidakpastian kebijakan. ([OECD](#))

Dengan demikian, Indonesia menghadapi dilema klasik negara berkembang: bagaimana mempertahankan pertumbuhan, memperluas keadilan sosial, dan menjaga kepercayaan publik dalam kondisi fiskal, moneter, dan geopolitik yang tidak mudah. Artikel ini menjawab dilema tersebut secara naratif dan analitis.

2. Pertumbuhan Ekonomi: Antara Ketahanan dan Transformasi

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting karena menunjukkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Pertumbuhan yang stabil mencerminkan daya tahan ekonomi, kapasitas konsumsi, investasi, perdagangan, dan efektivitas kebijakan makro. Indonesia patut

mencatat keberhasilan karena mampu mempertahankan pertumbuhan sekitar 5% dalam situasi global yang tidak selalu mendukung.

Pada 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% secara kumulatif. Dari sisi produksi, BPS mencatat aktivitas jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi, sedangkan dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan, dan belanja konsumsi pemerintah tumbuh sangat tinggi, yaitu 21,81% menurut rilis BPS. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki kekuatan domestik. Konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan aktivitas jasa masih menjadi penopang penting. Namun ketergantungan pada permintaan domestik juga menimbulkan pertanyaan: apakah Indonesia cukup berhasil membangun basis produktivitas baru melalui industri bernilai tambah, ekspor manufaktur, teknologi, riset, dan inovasi? Pertumbuhan yang didorong konsumsi penting, tetapi pertumbuhan jangka panjang memerlukan produktivitas.

Pertumbuhan yang kuat tetapi tidak transformatif dapat membuat ekonomi terjebak pada pola yang sama: konsumsi besar, ekspor komoditas, sektor informal luas, investasi yang belum cukup produktif, dan ketergantungan pada belanja fiskal. Untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperbaiki kualitas pendidikan, memperkuat industri, memperdalam teknologi, dan memperluas inovasi.

IMF menilai ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah guncangan, tetapi juga menekankan bahwa pertumbuhan yang tahan lama dan berkualitas membutuhkan bauran kebijakan yang hati-hati, penjaga stabilitas yang kuat, serta reformasi struktural yang berani dan sehat. ([IDEAS/RePEc](#)) Dengan kata lain, pertumbuhan 5% adalah fondasi, tetapi belum cukup sebagai tujuan akhir.

Transformasi pertumbuhan Indonesia harus menjawab beberapa persoalan utama. Pertama, bagaimana mengurangi ketergantungan pada komoditas primer. Kedua, bagaimana memperluas industri pengolahan bernilai tambah. Ketiga, bagaimana menjadikan hilirisasi bukan hanya pemrosesan bahan mentah, tetapi pembangunan teknologi dan kompetensi nasional. Keempat, bagaimana memperkuat UMKM agar tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas. Kelima, bagaimana memanfaatkan AI dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas. Keenam, bagaimana memastikan transisi energi tidak melemahkan daya saing, tetapi menjadi sumber inovasi.

Pertumbuhan Indonesia juga harus tahan terhadap guncangan eksternal. Globalisasi membuat ekonomi Indonesia terhubung dengan harga energi, suku bunga global, nilai tukar, arus modal, perang dagang, dan geopolitik. Pada Juni 2026, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5,75% untuk memperkuat stabilitas rupiah dan menjaga inflasi tetap dalam sasaran. ([Bank Indonesia](#)) Kebijakan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak dapat dilepaskan dari stabilitas moneter. Bila rupiah tertekan dan inflasi meningkat, daya beli rakyat dan kepercayaan investor dapat terganggu.

Pertumbuhan ekonomi yang sehat karena itu tidak boleh hanya mengejar angka tinggi dalam jangka pendek. Pertumbuhan harus kokoh, produktif, inklusif, dan dipercaya. Angka pertumbuhan tinggi yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah dapat memberi dorongan sementara, tetapi tidak otomatis menciptakan daya saing jangka panjang. Pertumbuhan yang berkualitas harus menghasilkan pekerjaan baik, meningkatkan produktivitas, memperkuat ekspor bernilai tambah, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat.

3. Keadilan Ekonomi: Dari Pertumbuhan ke Distribusi Manfaat

Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghasilkan keadilan. Dalam teori ekonomi klasik, pertumbuhan dapat meningkatkan pendapatan nasional,

tetapi distribusinya bergantung pada struktur kepemilikan aset, kualitas pekerjaan, sistem pajak, belanja publik, akses pendidikan, pasar tenaga kerja, regulasi, dan kekuasaan politik. Karena itu, pertanyaan penting bukan hanya "berapa persen ekonomi tumbuh?", tetapi "siapa yang menikmati pertumbuhan itu?"

BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 sebesar 8,25%, turun dibanding periode sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 23,36 juta orang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Angka ini menunjukkan kemajuan, tetapi 23,36 juta orang tetap merupakan jumlah yang besar. Mereka bukan sekadar statistik, melainkan keluarga yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial.

Dari sisi ketimpangan, Gini Ratio Indonesia pada September 2025 tercatat 0,363, turun dari 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Penurunan ini positif, tetapi ketimpangan tidak hanya dapat dibaca melalui pengeluaran. Ketimpangan juga tampak pada akses terhadap sekolah bermutu, layanan kesehatan, pekerjaan formal, kredit, tanah, internet, teknologi, dan jaringan ekonomi.

Keadilan ekonomi dapat dipahami dalam tiga lapisan. Pertama, **keadilan distribusi**, yaitu bagaimana pendapatan dan kekayaan dibagi. Kedua, **keadilan akses**, yaitu apakah semua warga memiliki peluang yang relatif setara untuk masuk ke dunia ekonomi. Ketiga, **keadilan proses**, yaitu apakah aturan main ekonomi berlaku adil bagi semua pihak.

Indonesia sering lebih berhasil memperbaiki kemiskinan ekstrem daripada memperbaiki ketimpangan akses struktural. Bantuan sosial dapat menurunkan kemiskinan jangka pendek, tetapi tidak otomatis memperbaiki kualitas pendidikan, akses modal, kualitas pekerjaan, atau kepemilikan aset. Subsidi dapat menahan harga, tetapi bila tidak tepat sasaran justru lebih banyak dinikmati kelompok mampu. Infrastruktur dapat dibangun, tetapi bila tidak terhubung dengan ekonomi lokal, manfaatnya dapat lebih cepat diserap kelompok besar.

Karena itu, keadilan ekonomi tidak boleh dipersempit menjadi bantuan sosial. Bantuan sosial penting sebagai jaring pengaman, tetapi keadilan jangka panjang membutuhkan **tangga mobilitas sosial**. Tangga itu terdiri dari pendidikan bermutu, kesehatan yang terjangkau, pekerjaan produktif, akses modal, hak atas tanah, transportasi publik, infrastruktur digital, perlindungan hukum, dan kesempatan berusaha.

Dalam konteks Indonesia, keadilan ekonomi juga harus dibaca secara wilayah. Ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, kota dan desa, pusat pertumbuhan dan daerah tertinggal, wilayah barat dan timur, masih menjadi tantangan. Pembangunan ekonomi yang hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat tertentu dapat memperkuat migrasi tidak seimbang, urbanisasi tanpa kesiapan, dan perasaan ketidakadilan daerah.

Keadilan ekonomi juga berkaitan dengan kualitas pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat 4,68%, turun 0,08 poin persentase dibanding Februari 2025, dan jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 147,67 juta orang. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Namun pekerjaan tidak sama dengan kesejahteraan bila upah rendah, jam kerja tidak pasti, perlindungan sosial lemah, produktivitas rendah, atau pekerja berada di sektor informal. Maka, indikator ketenagakerjaan perlu dibaca lebih luas: pekerjaan formal, upah layak, jaminan sosial, produktivitas, keterampilan, dan kesempatan naik kelas.

Keadilan ekonomi pada akhirnya adalah soal martabat. Rakyat tidak hanya ingin menerima bantuan. Rakyat ingin memiliki kesempatan untuk bekerja, berusaha, belajar, sehat, aman, dan berpartisipasi dalam ekonomi. Pertumbuhan yang adil adalah pertumbuhan yang memperluas martabat tersebut.

4. Kepercayaan Publik sebagai Modal Ekonomi

Kepercayaan publik adalah modal ekonomi yang sering tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. Negara dapat memiliki sumber daya alam, pasar

besar, dan anggaran besar, tetapi bila masyarakat tidak percaya kepada pemerintah, kebijakan sulit berjalan. Investor menunda keputusan. Warga enggan membayar pajak. Pelaku usaha mencari jalur informal. Kebijakan reformasi ditolak. Data resmi dipertanyakan. Program sosial dicurigai sebagai alat politik. Kepercayaan adalah perekat antara negara, pasar, dan masyarakat.

Kepercayaan publik lahir dari pengalaman. Warga percaya jika layanan publik cepat, bantuan sosial tepat sasaran, hukum adil, pajak digunakan baik, pejabat bertanggung jawab, dan kebijakan dijelaskan secara jujur. Sebaliknya, kepercayaan melemah jika rakyat melihat korupsi, ketidakadilan hukum, proyek tidak transparan, data yang membingungkan, atau kebijakan yang berubah-ubah.

Dalam konteks Indonesia, kepercayaan publik menghadapi tantangan tata kelola. Transparency International mencatat Indonesia memperoleh skor CPI 34 pada 2025 dan peringkat 109 dari 182 negara/wilayah.

([Transparency.org](https://www.transparency.org)) CPI adalah indikator persepsi, bukan ukuran sempurna semua bentuk korupsi, tetapi ia memberi sinyal bahwa integritas sektor publik masih menjadi masalah yang dapat memengaruhi daya saing, keadilan, dan legitimasi kebijakan.

Korupsi merusak ekonomi melalui beberapa jalur. Korupsi menaikkan biaya usaha, menurunkan kualitas infrastruktur, memperburuk layanan publik, mengalihkan anggaran dari rakyat kepada jaringan tertentu, dan melemahkan persaingan sehat. Korupsi juga merusak kepercayaan karena masyarakat merasa aturan tidak berlaku sama. Jika hukum dapat dibeli, regulasi dapat dinegosiasikan, atau proyek dapat diarahkan, maka rakyat sulit percaya bahwa ekonomi bekerja untuk kepentingan umum.

Kepercayaan publik juga berkaitan dengan data. Dalam ekonomi modern, data resmi menjadi dasar kebijakan. Bila data pertumbuhan, kemiskinan, pengangguran, inflasi, atau anggaran dipertanyakan, maka kebijakan menjadi rapuh. Data harus akurat, transparan, metodologinya jelas, dan

komunikasinya terbuka. Kepercayaan terhadap data adalah bagian dari kepercayaan terhadap negara.

Kepercayaan publik juga sangat terkait dengan APBN. APBN adalah uang rakyat. Jika rakyat percaya bahwa APBN digunakan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan produktivitas, maka legitimasi fiskal meningkat. Jika rakyat merasa APBN digunakan untuk kepentingan elite, proyek tidak produktif, subsidi salah sasaran, atau belanja politik jangka pendek, maka kepercayaan menurun.

Dalam situasi ekonomi yang berat, kepercayaan menjadi lebih penting. Ketika pemerintah perlu melakukan reformasi subsidi, menaikkan pajak, mengendalikan defisit, atau menata ulang program sosial, masyarakat akan lebih menerima bila percaya bahwa beban dibagi adil dan manfaatnya jelas. Tanpa kepercayaan, reformasi yang benar secara ekonomi dapat gagal secara politik.

Karena itu, kepercayaan publik bukan sekadar urusan komunikasi. Kepercayaan adalah hasil dari tata kelola yang nyata: integritas, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

5. APBN: Mesin Pertumbuhan, Keadilan, dan Kepercayaan

APBN adalah instrumen utama untuk menghubungkan pertumbuhan, keadilan, dan kepercayaan. Melalui APBN, negara membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, subsidi, transfer daerah, pertahanan, riset, dan pelayanan publik. APBN dapat menjadi mesin pertumbuhan bila belanja negara meningkatkan produktivitas. APBN dapat menjadi mesin keadilan bila anggaran berpihak kepada kelompok rentan dan daerah tertinggal. APBN dapat menjadi mesin kepercayaan bila dikelola transparan dan akuntabel.

APBN 2026 disusun dalam konteks ambisi pertumbuhan dan tekanan fiskal. OECD mencatat defisit anggaran Indonesia diperkirakan melebar dari 2,9%

PDB pada 2025 menjadi 3,0% pada 2026, sementara target APBN 2026 berada di sekitar 2,7% PDB; OECD juga memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dapat menambah defisit sekitar 0,6% PDB bila pembekuan harga BBM bersubsidi dipertahankan. ([OECD](#))

Di satu sisi, belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan. Pada triwulan I 2026, belanja konsumsi pemerintah tumbuh tinggi dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Namun di sisi lain, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada belanja fiskal menimbulkan pertanyaan keberlanjutan. APBN memiliki batas: defisit harus dijaga, utang harus dikelola, subsidi harus tepat sasaran, dan belanja harus menghasilkan dampak.

Kualitas belanja publik menjadi kunci. Belanja pendidikan harus meningkatkan mutu pembelajaran, bukan hanya membiayai rutinitas. Belanja kesehatan harus memperkuat pencegahan dan layanan, bukan hanya membayar klaim. Belanja infrastruktur harus menurunkan biaya logistik, bukan hanya membangun fisik. Belanja perlindungan sosial harus tepat sasaran dan memberdayakan, bukan sekadar transfer jangka pendek. Belanja hilirisasi harus menciptakan teknologi, pekerjaan berkualitas, dan nilai tambah nasional, bukan hanya rente baru.

APBN juga harus menjaga keadilan antargenerasi. Defisit dan utang hari ini akan dibayar di masa depan. Utang bukan masalah bila digunakan untuk investasi produktif yang meningkatkan kapasitas ekonomi. Namun utang menjadi beban bila digunakan untuk belanja konsumtif, subsidi tidak tepat sasaran, atau proyek yang tidak produktif. Keadilan antargenerasi menuntut agar setiap rupiah utang menciptakan nilai masa depan.

APBN juga memengaruhi kepercayaan investor. Jika pasar melihat APBN kredibel, defisit terkendali, belanja produktif, dan risiko fiskal transparan, maka kepercayaan meningkat. Jika pasar melihat defisit melebar tanpa strategi jelas, subsidi membengkak, dan risiko off-budget tidak transparan, maka premi risiko naik, rupiah tertekan, dan biaya pembiayaan meningkat.

Dengan demikian, APBN bukan hanya dokumen fiskal. APBN adalah kontrak sosial. Ia menunjukkan apakah negara mampu mengubah pajak, utang, dan belanja menjadi kesejahteraan. APBN yang baik adalah APBN yang menghasilkan pertumbuhan, memperkuat keadilan, dan membangun kepercayaan publik.

6. Stabilitas Makro: Rupiah, Inflasi, dan Suku Bunga

Pertumbuhan dan keadilan membutuhkan stabilitas makroekonomi. Inflasi yang tinggi merugikan rakyat kecil karena harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada pendapatan. Rupiah yang melemah dapat menaikkan biaya impor, energi, bahan baku, dan utang valas. Suku bunga yang terlalu tinggi dapat menekan kredit, investasi, dan konsumsi. Namun suku bunga yang terlalu rendah dalam kondisi tekanan rupiah dapat memperburuk inflasi dan arus modal keluar.

Pada 18 Juni 2026, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%, dengan Deposit Facility 4,75% dan Lending Facility 6,50%. BI menyatakan keputusan itu ditujukan untuk memperkuat stabilisasi rupiah di tengah ketidakpastian global dan menjaga inflasi dalam sasaran. ([Bank Indonesia](#)) Keputusan ini memperlihatkan bahwa stabilitas moneter tetap menjadi syarat penting bagi pembangunan.

Namun stabilitas moneter memiliki trade-off. Kenaikan suku bunga dapat membantu rupiah dan menahan inflasi, tetapi juga dapat meningkatkan biaya pinjaman. UMKM, rumah tangga, sektor properti, dan industri padat modal dapat terdampak. Karena itu, kebijakan moneter perlu didukung oleh kebijakan fiskal yang kredibel dan kebijakan sektor riil yang produktif.

Stabilitas harga juga terkait subsidi energi. Subsidi dapat menahan inflasi jangka pendek, tetapi bila terlalu luas dan mahal, APBN tertekan. Jika APBN tertekan, pasar dapat meragukan kredibilitas fiskal. Jika kredibilitas fiskal melemah, rupiah dapat tertekan. Jika rupiah melemah, biaya subsidi energi

meningkat. Maka, subsidi energi dapat menciptakan lingkaran risiko bila tidak direformasi secara bertahap dan tepat sasaran.

World Bank dalam laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2026 menempatkan fokus pada “Managing Risks, Unlocking Productivity”, yang menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengelola risiko makro sambil membuka sumber produktivitas baru. ([World Bank](#)) Ini penting karena stabilitas saja tidak cukup. Stabilitas harus menjadi fondasi produktivitas, bukan sekadar pertahanan terhadap krisis.

Stabilitas makro juga memengaruhi keadilan. Inflasi pangan menghantam kelompok miskin. Kenaikan bunga dapat memukul debitur kecil.

Pelemahan rupiah dapat menaikkan harga barang impor. Defisit fiskal yang tidak terkendali dapat mengurangi ruang belanja sosial di masa depan. Karena itu, kebijakan stabilitas harus dirancang dengan sensitivitas sosial.

Ekonomi Indonesia membutuhkan stabilitas yang pro-rakyat dan pro-produktivitas: inflasi rendah, rupiah terkendali, defisit kredibel, bunga tidak berlebihan, dan pembiayaan mengalir ke sektor produktif.

7. Produktivitas: Kunci Keluar dari Pertumbuhan Biasa

Indonesia tidak dapat selamanya puas dengan pertumbuhan sekitar 5%.

Pertumbuhan tersebut penting, tetapi untuk mencapai lompatan

kesejahteraan, Indonesia membutuhkan peningkatan produktivitas.

Produktivitas berarti kemampuan menghasilkan output lebih besar dengan input yang sama atau lebih sedikit. Produktivitas lahir dari pendidikan, kesehatan, teknologi, organisasi, infrastruktur, inovasi, efisiensi logistik, dan tata kelola.

World Bank mencatat bahwa laporan Indonesia Economic Prospects 2026 mengangkat tema “Managing Risks, Unlocking Productivity”. ([World Bank](#))

Pilihan tema ini tepat karena tantangan besar Indonesia bukan hanya menjaga pertumbuhan saat ini, tetapi membuka sumber pertumbuhan

masa depan. Jika produktivitas tidak naik, pertumbuhan akan bergantung pada konsumsi, komoditas, dan belanja fiskal.

Produktivitas Indonesia menghadapi beberapa hambatan. Pertama, kualitas pendidikan dan keterampilan belum merata. Kedua, sektor informal masih besar. Ketiga, UMKM banyak yang berskala kecil dan produktivitasnya rendah. Keempat, biaya logistik dan infrastruktur masih menjadi beban. Kelima, riset dan inovasi belum menjadi arus utama industri. Keenam, regulasi dan birokrasi masih dapat menambah biaya transaksi. Ketujuh, akses keuangan produktif belum merata.

Produktivitas juga berkaitan dengan struktur ekonomi. Sektor pertanian menyerap banyak tenaga kerja, tetapi produktivitasnya sering lebih rendah daripada industri dan jasa modern. BPS mencatat pada Februari 2026, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap 42,49 juta pekerja atau 28,78% dari total penduduk bekerja. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Ini menunjukkan pentingnya transformasi pertanian: teknologi, irigasi, logistik, akses pasar, pengolahan, dan regenerasi petani.

Hilirisasi sumber daya alam dapat menjadi strategi produktivitas bila dilakukan dengan benar. Namun hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter atau pabrik dasar. Hilirisasi harus menciptakan rantai nilai yang lebih panjang, kemampuan teknologi, riset, pemasok lokal, tenaga kerja terampil, standar lingkungan, dan industri pendukung. Tanpa itu, hilirisasi dapat menjadi industrialisasi dangkal.

AI dan digitalisasi juga dapat meningkatkan produktivitas. AI dapat membantu administrasi, pendidikan, kesehatan, logistik, pertanian, manufaktur, dan layanan publik. Namun AI hanya produktif bila data baik, SDM siap, infrastruktur tersedia, dan tata kelola jelas. Jika tidak, AI hanya menjadi konsumsi teknologi, bukan transformasi ekonomi.

Produktivitas adalah jembatan antara pertumbuhan dan keadilan. Jika produktivitas meningkat, upah dapat naik tanpa menurunkan daya saing. Penerimaan pajak dapat meningkat tanpa menaikkan tarif secara

berlebihan. UMKM dapat naik kelas. Belanja sosial dapat dibiayai lebih berkelanjutan. Karena itu, Indonesia harus menjadikan produktivitas sebagai inti strategi ekonomi.

8. UMKM, Kelas Menengah, dan Ekonomi Rakyat

Ekonomi Indonesia tidak hanya digerakkan oleh korporasi besar dan investasi asing. UMKM, pekerja informal, petani, nelayan, pedagang kecil, koperasi, dan ekonomi lokal membentuk fondasi kehidupan ekonomi rakyat. Namun, mereka sering menghadapi hambatan akses: modal, pasar, teknologi, legalitas, informasi, logistik, dan perlindungan hukum.

Pertumbuhan yang adil harus memperkuat UMKM. Namun memperkuat UMKM tidak cukup dengan bantuan sesaat. UMKM membutuhkan ekosistem. Ekosistem itu mencakup pembiayaan produktif, pelatihan manajemen, digitalisasi, standardisasi produk, akses pengadaan pemerintah, koneksi rantai pasok, perlindungan dari praktik monopoli, serta pendampingan berbasis kebutuhan.

Digitalisasi membuka peluang besar bagi UMKM, tetapi juga membawa risiko ketergantungan pada platform. Banyak UMKM masuk marketplace dan media sosial, tetapi tidak selalu menguasai data pelanggan. Algoritma platform dapat menentukan visibilitas produk. Biaya iklan digital dapat meningkat. Karena itu, kebijakan ekonomi digital harus memastikan UMKM tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi memperoleh kapasitas dan posisi tawar.

Kelas menengah juga harus menjadi perhatian. Kelas menengah Indonesia sering menjadi penopang konsumsi, pajak, pendidikan, dan stabilitas sosial. Namun mereka rentan terhadap biaya hidup, pendidikan, kesehatan, perumahan, cicilan, dan ketidakpastian pekerjaan. Jika kelas menengah melemah, konsumsi rumah tangga dapat tertekan dan kepercayaan publik menurun.

Kebijakan ekonomi yang adil tidak hanya memberi bantuan kepada kelompok miskin, tetapi juga memperkuat layanan publik agar kelas menengah tidak terbebani biaya privat yang mahal. Sekolah negeri bermutu, rumah sakit publik yang baik, transportasi publik, perumahan terjangkau, dan perlindungan tenaga kerja adalah bentuk dukungan bagi kelas menengah.

Ekonomi rakyat juga membutuhkan keadilan regulasi. Regulasi yang terlalu rumit sering lebih berat bagi pelaku kecil daripada perusahaan besar. Perusahaan besar mampu menyewa konsultan, pengacara, dan staf kepatuhan. Pelaku kecil tidak. Oleh karena itu, legalitas UMKM harus mudah, murah, bertahap, dan memberi manfaat nyata.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih kokoh bila ekonomi rakyat naik kelas. Ekonomi yang hanya bertumpu pada konglomerasi besar akan rentan terhadap konsentrasi kekayaan. Ekonomi yang memperluas kapasitas UMKM dan kelas menengah akan lebih inklusif, stabil, dan dipercaya.

9. Keadilan Wilayah dan Infrastruktur Sosial

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Karena itu, keadilan ekonomi harus dibaca dalam dimensi geografis. Tidak cukup mengatakan ekonomi nasional tumbuh bila sebagian wilayah tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan, listrik, internet, jalan, pelabuhan, air bersih, dan pasar. Pertumbuhan nasional yang tidak merata dapat menciptakan ketidakpuasan wilayah dan perasaan ditinggalkan.

Pemerataan wilayah membutuhkan dua jenis infrastruktur. Pertama, **infrastruktur fisik**: jalan, pelabuhan, bandara, listrik, irigasi, air bersih, transportasi publik, dan konektivitas digital. Kedua, **infrastruktur sosial**: sekolah, guru, puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, layanan administrasi, perlindungan sosial, dan lembaga ekonomi lokal.

Sering kali pembangunan terlalu menekankan infrastruktur fisik, padahal infrastruktur sosial menentukan kemampuan rakyat memanfaatkan konektivitas. Jalan yang baik membantu ekonomi, tetapi tanpa pendidikan dan modal, masyarakat lokal belum tentu memperoleh manfaat besar. Pelabuhan membuka pasar, tetapi tanpa kapasitas produksi, daerah hanya menjadi jalur distribusi. Internet membuka peluang digital, tetapi tanpa literasi digital, manfaatnya terbatas.

Transfer ke daerah melalui APBN memiliki peran besar dalam pemerataan. Namun efektivitas transfer bergantung pada kapasitas pemerintah daerah. Daerah yang memiliki tata kelola baik dapat menggunakan dana untuk meningkatkan layanan. Daerah yang kapasitasnya lemah dapat terjebak pada belanja rutin dan proyek kecil yang tidak transformasional.

Keadilan wilayah juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Banyak daerah kaya sumber daya tidak otomatis sejahtera. Jika manfaat SDA lebih banyak mengalir ke pusat atau perusahaan besar, masyarakat lokal tetap tertinggal. Karena itu, kebijakan fiskal daerah, dana bagi hasil, royalti, CSR, dan pembangunan lokal harus dirancang agar sumber daya alam menjadi modal daerah, bukan sumber konflik.

Pemerataan wilayah bukan hanya agenda moral, tetapi agenda ekonomi. Indonesia akan lebih kompetitif bila lebih banyak wilayah menjadi pusat produksi, inovasi, pariwisata, pangan, energi, dan industri. Konsentrasi ekonomi yang terlalu tinggi membuat negara rentan terhadap kemacetan, urbanisasi berlebihan, dan ketimpangan.

10. Kepercayaan Investor dan Kepercayaan Rakyat

Dalam ekonomi modern, kepercayaan investor dan kepercayaan rakyat sama-sama penting. Investor membutuhkan kepastian hukum, stabilitas makro, regulasi konsisten, dan prospek pasar. Rakyat membutuhkan keadilan, pekerjaan, layanan publik, dan rasa bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan elite. Jika pemerintah hanya mengejar kepercayaan

investor tanpa memperhatikan rakyat, legitimasi sosial melemah. Jika pemerintah hanya mengejar popularitas rakyat tanpa menjaga kredibilitas ekonomi, stabilitas makro dapat terganggu.

Kepercayaan investor dapat tertekan oleh defisit fiskal yang tidak jelas, pelemahan rupiah, inflasi, ketidakpastian regulasi, korupsi, atau campur tangan politik yang berlebihan. Kepercayaan rakyat dapat tertekan oleh harga pangan, pengangguran, ketimpangan, layanan buruk, korupsi, atau kebijakan yang dianggap tidak adil. Negara harus menjaga keduanya.

OECD memperingatkan bahwa biaya energi, ketidakpastian kebijakan, pelemahan pasar tenaga kerja, dan kenaikan biaya pinjaman dapat menekan konsumsi dan investasi Indonesia. ([OECD](#)) Peringatan ini menunjukkan bahwa kepercayaan ekonomi bukan sesuatu yang abstrak. Ketika pelaku usaha ragu, investasi tertunda. Ketika rumah tangga ragu, konsumsi melemah. Ketika pasar ragu, biaya pembiayaan naik.

Kepercayaan juga sangat bergantung pada konsistensi kebijakan. Kebijakan yang sering berubah tanpa penjelasan membuat pelaku ekonomi sulit merencanakan. Regulasi yang tumpang tindih menaikkan biaya. Komunikasi pemerintah yang tidak sinkron menimbulkan kebingungan. Negara perlu membangun disiplin komunikasi kebijakan: data yang jelas, alasan yang transparan, dan koordinasi antar-lembaga.

Namun kepercayaan tidak boleh hanya dipahami dari perspektif pasar. Rakyat juga harus percaya bahwa pertumbuhan tidak dibangun dengan mengorbankan mereka. Reformasi subsidi, misalnya, dapat diterima bila bantuan langsung tepat sasaran dan komunikasi publik jujur. Hilirisasi dapat diterima bila menciptakan lapangan kerja, menjaga lingkungan, dan memberi manfaat daerah. Digitalisasi dapat diterima bila memudahkan layanan dan melindungi data pribadi.

Ekonomi Indonesia akan kuat bila investor dan rakyat sama-sama percaya. Kepercayaan investor memberi modal. Kepercayaan rakyat memberi legitimasi. Keduanya diperlukan untuk pembangunan jangka panjang.

11. Tata Kelola: Infrastruktur Tak Terlihat Ekonomi

Tata kelola adalah infrastruktur tak terlihat yang menentukan kualitas ekonomi. Jalan, pelabuhan, sekolah, dan rumah sakit adalah infrastruktur fisik dan sosial yang tampak. Namun di baliknya ada tata kelola: perencanaan, anggaran, pengadaan, regulasi, hukum, data, audit, dan akuntabilitas. Tanpa tata kelola, infrastruktur dapat mahal, lambat, bocor, atau tidak tepat guna.

Tata kelola yang baik menurunkan biaya ekonomi. Jika izin cepat dan jelas, usaha lebih mudah tumbuh. Jika hukum adil, kontrak lebih aman. Jika pengadaan transparan, kualitas proyek meningkat. Jika data sosial akurat, bantuan tepat sasaran. Jika korupsi ditekan, belanja publik lebih produktif. Jika regulasi konsisten, investor lebih percaya.

Sebaliknya, tata kelola lemah menciptakan ekonomi rente. Pelaku ekonomi tidak lagi bersaing melalui produktivitas, tetapi melalui akses. Izin, konsesi, proyek, subsidi, dan perlindungan regulasi menjadi sumber keuntungan. Ekonomi rente merusak keadilan karena pelaku kecil sulit bersaing. Ia juga merusak pertumbuhan karena modal mengalir ke aktivitas yang dekat dengan kekuasaan, bukan ke aktivitas yang paling produktif.

Good governance juga berkaitan dengan daya saing nasional. Negara yang birokrasi dan hukumnya baik lebih mampu menarik investasi berkualitas. Negara yang korupsinya rendah lebih efisien. Negara yang datanya baik lebih mampu membuat kebijakan tepat. Negara yang regulasinya jelas lebih mendorong inovasi.

Indonesia perlu menempatkan tata kelola sebagai bagian dari strategi ekonomi, bukan sekadar agenda moral. Antikorupsi, reformasi birokrasi, digital government, open data, dan rule of law harus dipahami sebagai instrumen pertumbuhan dan keadilan. Jika tata kelola baik, ekonomi lebih efisien dan adil. Jika tata kelola buruk, pertumbuhan menjadi mahal dan tidak dipercaya.

Kepercayaan publik pada akhirnya sangat bergantung pada tata kelola. Rakyat bisa menerima kebijakan sulit bila percaya bahwa prosesnya adil. Investor bisa menerima risiko pasar bila percaya bahwa hukum dan regulasi konsisten. Tata kelola adalah sumber kepercayaan itu.

12. Sumber Daya Alam, Hilirisasi, dan Keadilan Antargenerasi

Indonesia memiliki sumber daya alam besar: nikel, batubara, sawit, tembaga, gas, hutan, laut, biodiversitas, dan potensi energi terbarukan. Sumber daya ini dapat menjadi modal strategis untuk pertumbuhan. Namun sejarah banyak negara menunjukkan bahwa SDA juga dapat menjadi sumber rente, korupsi, konflik, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan.

Hilirisasi adalah salah satu strategi penting untuk keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah. Dengan hilirisasi, Indonesia berupaya meningkatkan nilai tambah domestik, menciptakan industri pengolahan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat posisi geopolitik. Namun hilirisasi harus dikelola dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Ada beberapa pertanyaan penting. Apakah hilirisasi menciptakan pekerjaan berkualitas bagi tenaga kerja Indonesia? Apakah ada transfer teknologi? Apakah pemasok lokal terlibat? Apakah daerah penghasil memperoleh manfaat? Apakah lingkungan dijaga? Apakah energi yang digunakan berkelanjutan? Apakah insentif fiskal sepadan dengan hasil? Apakah keuntungan hilirisasi terkonsentrasi pada segelintir aktor?

Jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab, hilirisasi dapat menjadi pertumbuhan tanpa keadilan. Industri tumbuh, tetapi masyarakat lokal tidak naik kelas. Ekspor meningkat, tetapi lingkungan rusak. Investasi masuk, tetapi teknologi tidak dikuasai. Negara memberi insentif, tetapi nilai publik terbatas.

Keadilan antargenerasi juga penting. SDA yang dieksploitasi hari ini tidak dapat selalu diperbarui. Generasi mendatang berhak atas lingkungan yang sehat, sumber daya yang tersisa, dan ekonomi yang lebih beragam. Karena itu, pendapatan SDA harus digunakan untuk investasi masa depan: pendidikan, riset, energi bersih, teknologi, restorasi lingkungan, dan diversifikasi ekonomi.

SDA dapat menjadi berkah bila dikelola dengan tata kelola baik. SDA dapat menjadi kutukan bila dikelola sebagai rente. Pertumbuhan Indonesia harus memastikan SDA menjadi modal transformasi, bukan sumber ketimpangan.

13. Pendidikan, Kesehatan, dan Modal Manusia

Pertumbuhan jangka panjang Indonesia sangat bergantung pada modal manusia. Modal manusia mencakup pendidikan, kesehatan, keterampilan, gizi, karakter, kreativitas, dan kemampuan adaptasi. Dalam era AI, digitalisasi, dan perubahan industri, modal manusia menjadi semakin menentukan.

Pendidikan bukan hanya belanja sosial, tetapi investasi produktivitas. Sekolah yang baik meningkatkan kemampuan berpikir, literasi, numerasi, teknologi, dan karakter. Perguruan tinggi yang baik menghasilkan riset, inovasi, dan pemimpin. Pendidikan vokasi yang baik menghubungkan keterampilan dengan kebutuhan industri. Tanpa pendidikan bermutu, Indonesia akan sulit naik dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis pengetahuan.

Kesehatan juga merupakan fondasi produktivitas. Anak yang bergizi baik belajar lebih baik. Pekerja sehat lebih produktif. Masyarakat yang memiliki akses kesehatan tidak mudah jatuh miskin karena biaya berobat. Program gizi, kesehatan ibu-anak, pencegahan penyakit, dan layanan primer adalah investasi ekonomi jangka panjang.

Keadilan dalam pendidikan dan kesehatan sangat penting. Jika pendidikan bermutu hanya dapat diakses kelompok mampu, maka ketimpangan akan diwariskan antar-generasi. Jika layanan kesehatan baik hanya tersedia di kota besar, maka wilayah tertinggal sulit mengejar. Negara harus memastikan layanan dasar berkualitas sebagai hak warga.

Kepercayaan publik juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan. Warga paling merasakan negara melalui sekolah dan rumah sakit. Bila sekolah buruk dan rumah sakit sulit diakses, rakyat merasa negara jauh. Bila layanan membaik, kepercayaan tumbuh.

Dengan demikian, strategi ekonomi Indonesia harus menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai inti, bukan pelengkap. Pertumbuhan tinggi tanpa modal manusia akan rapuh. Keadilan tanpa modal manusia akan sulit berkelanjutan.

14. Ekonomi Digital, AI, dan Masa Depan Produktivitas

Ekonomi digital dan AI membuka peluang besar bagi Indonesia. Platform digital dapat memperluas pasar UMKM. Fintech dapat memperluas akses keuangan. AI dapat membantu pendidikan, kesehatan, pertanian, logistik, manufaktur, dan birokrasi. Data dapat membuat kebijakan lebih tepat. Namun ekonomi digital juga menimbulkan risiko: monopoli platform, eksploitasi data, pekerjaan gig yang rentan, disinformasi, dan kesenjangan digital.

Ekonomi digital harus diarahkan untuk produktivitas inklusif. Artinya, teknologi tidak hanya memperkaya platform besar, tetapi membantu pelaku kecil naik kelas. UMKM perlu pelatihan, akses alat digital, perlindungan data, dan posisi tawar. Pekerja gig perlu perlindungan dasar. Konsumen perlu keamanan. Pemerintah perlu regulasi yang mendorong inovasi sekaligus melindungi publik.

AI juga harus dipahami sebagai teknologi ekonomi-politik. Siapa yang menguasai data, komputasi, algoritma, dan platform akan memiliki kekuatan besar. Indonesia perlu memastikan bahwa AI tidak hanya menjadi produk impor, tetapi menjadi alat pembangunan nasional. Ini membutuhkan talenta, infrastruktur digital, model bahasa lokal, riset, etika, dan tata kelola data.

Kesenjangan digital menjadi masalah keadilan. Jika sekolah kota menggunakan AI sementara sekolah desa belum memiliki internet stabil, ketimpangan pendidikan dapat melebar. Jika perusahaan besar memakai AI untuk efisiensi sementara UMKM tertinggal, ketimpangan produktivitas dapat melebar. Jika pemerintah menggunakan data tanpa perlindungan privasi, kepercayaan publik dapat rusak.

Karena itu, digitalisasi dan AI harus dikelola dengan prinsip: inklusif, aman, etis, produktif, dan berdaulat. Teknologi harus memperkuat manusia, bukan sekadar menggantikan manusia. Teknologi harus memperluas akses, bukan memperkuat monopoli.

15. Demokrasi Ekonomi dan Kepercayaan Sosial

Ekonomi yang sehat membutuhkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi bukan berarti semua aset harus dimiliki negara, tetapi berarti akses terhadap peluang ekonomi tidak boleh dikuasai oleh segelintir kelompok. Regulasi, pajak, belanja publik, pendidikan, hukum, dan pasar harus dirancang agar lebih banyak rakyat dapat berpartisipasi.

Demokrasi ekonomi mencakup akses UMKM ke pasar, akses pekerja ke perlindungan, akses petani ke tanah dan teknologi, akses daerah ke infrastruktur, akses masyarakat miskin ke pendidikan, akses perempuan ke pekerjaan, dan akses publik ke informasi. Jika akses ekonomi tertutup, maka pertumbuhan menjadi milik sedikit orang.

Kepercayaan sosial juga penting. Masyarakat yang percaya satu sama lain lebih mudah bekerja sama, membayar pajak, mengikuti aturan, dan membangun usaha. Ketimpangan yang terlalu tinggi dapat merusak kepercayaan sosial karena masyarakat merasa sistem tidak adil. Korupsi juga merusak kepercayaan sosial karena orang merasa yang jujur kalah dari yang dekat dengan kekuasaan.

Ekonomi Indonesia membutuhkan kontrak sosial baru: pertumbuhan harus memberi peluang; pajak harus dikelola adil; subsidi harus tepat sasaran; hukum harus berlaku sama; sumber daya alam harus memberi manfaat nasional; dan teknologi harus memperkuat rakyat. Kontrak sosial ini akan membangun kepercayaan.

Kepercayaan publik bukan sesuatu yang dapat dibangun dalam semalam. Ia dibangun melalui konsistensi kebijakan, integritas lembaga, keberhasilan layanan, dan keadilan yang dirasakan.

16. Tantangan Global: Energi, Geopolitik, dan Rantai Pasok

Ekonomi Indonesia tidak berada dalam ruang tertutup. Harga minyak, suku bunga global, perang, perubahan iklim, rantai pasok, dan kebijakan negara besar memengaruhi Indonesia. Ketika harga energi naik, APBN dan inflasi tertekan. Ketika suku bunga global tinggi, arus modal dapat keluar dan rupiah tertekan. Ketika perang dagang meningkat, ekspor dapat terganggu. Ketika rantai pasok berubah, Indonesia harus bersaing menarik investasi.

OECD memperingatkan bahwa gangguan energi yang berkepanjangan dapat melemahkan pertumbuhan global dan menaikkan inflasi, menciptakan trade-off sulit bagi pembuat kebijakan. ([OECD](#)) Untuk Indonesia, risiko global ini berarti perlunya ketahanan energi, diversifikasi ekspor, cadangan fiskal, pasar keuangan yang dalam, dan kebijakan industri yang adaptif.

Ketahanan ekonomi tidak berarti menutup diri. Indonesia tetap membutuhkan perdagangan, investasi, teknologi, dan kerja sama global. Namun keterbukaan harus disertai kapasitas domestik. Indonesia harus mampu memilih investasi yang membawa nilai tambah, mengelola risiko impor energi, memperkuat pangan, dan membangun industri strategis.

Perubahan rantai pasok global juga merupakan peluang. Banyak perusahaan mencari lokasi produksi yang lebih terdiversifikasi. Indonesia dapat menarik investasi jika memiliki infrastruktur, tenaga kerja, regulasi, energi, dan tata kelola yang baik. Namun peluang ini dapat hilang jika kebijakan tidak konsisten atau birokrasi lambat.

Dalam dunia yang tidak pasti, kepercayaan menjadi aset geopolitik. Negara yang dipercaya lebih mudah menarik modal, teknologi, dan kerja sama. Maka, tata kelola domestik menjadi bagian dari strategi global.

17. Tiga Skenario Ekonomi Indonesia

Skenario 1: Pertumbuhan Inklusif dan Kepercayaan Menguat

Dalam skenario terbaik, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan sekitar 5%–6% sambil meningkatkan produktivitas. APBN dikelola kredibel, subsidi energi direformasi bertahap, bantuan sosial tepat sasaran, pendidikan dan kesehatan diperkuat, UMKM naik kelas, hilirisasi menciptakan nilai tambah, dan tata kelola membaik. Dalam skenario ini, kemiskinan terus turun, kelas menengah menguat, investasi produktif meningkat, dan kepercayaan publik bertambah.

Skenario 2: Pertumbuhan Stabil tetapi Keadilan Terbatas

Dalam skenario moderat, ekonomi tetap tumbuh sekitar 5%, tetapi produktivitas meningkat lambat. Pertumbuhan masih banyak bertumpu pada konsumsi, belanja pemerintah, dan komoditas. Kemiskinan turun perlahan, tetapi pekerjaan berkualitas belum cukup. Ketimpangan akses

tetap besar. Kepercayaan publik stabil tetapi rapuh. Indonesia tidak krisis, tetapi belum melakukan lompatan.

Skenario 3: Pertumbuhan Tertekan dan Kepercayaan Melemah

Dalam skenario buruk, tekanan global menaikkan energi dan inflasi, rupiah melemah, suku bunga tinggi menekan kredit, subsidi membebani APBN, dan reformasi fiskal tertunda. Belanja produktif terdesak, investasi menurun, kelas menengah melemah, dan masyarakat meragukan kebijakan. Dalam skenario ini, pertumbuhan melambat, ketimpangan terasa lebih tajam, dan kepercayaan publik turun.

Skenario mana yang terjadi bergantung pada pilihan kebijakan. Indonesia memiliki modal besar, tetapi modal itu harus dikelola dengan disiplin, keadilan, dan integritas.

18. Agenda Kebijakan: Menuju Pertumbuhan yang Adil dan Dipercaya

Pertama, **tingkatkan produktivitas sebagai inti pertumbuhan**. Indonesia perlu memperkuat pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, logistik, dan reformasi regulasi. Pertumbuhan tidak boleh hanya bergantung pada konsumsi dan belanja pemerintah.

Kedua, **perkuat kualitas pekerjaan**. Kebijakan ketenagakerjaan perlu mendorong pekerjaan formal, upah layak, perlindungan sosial, pelatihan ulang, dan hubungan industri yang adaptif.

Ketiga, **reformasi subsidi energi secara bertahap dan adil**. Subsidi luas harus digeser menjadi bantuan tepat sasaran, transportasi publik, efisiensi energi, dan energi bersih. Reformasi harus disertai komunikasi publik dan perlindungan kelompok rentan.

Keempat, **jadikan APBN berbasis dampak**. Belanja publik harus dinilai dari hasil: kualitas pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, produktivitas, dan pemerataan wilayah.

Kelima, **perkuat UMKM dan ekonomi rakyat**. UMKM membutuhkan akses modal, pasar, digitalisasi, pengadaan pemerintah, pelatihan, koperasi modern, dan perlindungan dari praktik pasar tidak sehat.

Keenam, **perbaiki tata kelola dan antikorupsi**. Korupsi harus dipahami sebagai hambatan ekonomi. Pengadaan, perizinan, konsesi, subsidi, dan insentif harus transparan.

Ketujuh, **bangun kepercayaan melalui data terbuka dan komunikasi jujur**. Pemerintah harus menjelaskan kebijakan dengan data, membuka proses, dan menerima kritik.

Kedelapan, **perkuat keadilan wilayah**. Transfer daerah harus berbasis kinerja, infrastruktur harus terhubung dengan ekonomi lokal, dan layanan dasar di daerah tertinggal harus menjadi prioritas.

Kesembilan, **kelola hilirisasi dengan standar keberlanjutan**. Hilirisasi harus menciptakan teknologi, pekerjaan, manfaat daerah, dan perlindungan lingkungan.

Kesepuluh, **bangun ekonomi digital yang inklusif**. AI dan digitalisasi harus memperluas akses pendidikan, kesehatan, UMKM, dan layanan publik, bukan memperdalam kesenjangan.

19. Kesimpulan

Ekonomi Indonesia berada dalam persimpangan penting. Pertumbuhan masih cukup kuat, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan 5,11% pada 2025 dan 5,61% pada triwulan I 2026. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran juga menunjukkan perbaikan, dengan kemiskinan 8,25% dan Gini Ratio 0,363 pada September 2025. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Namun masa depan ekonomi Indonesia tidak dapat hanya dinilai dari angka pertumbuhan dan penurunan kemiskinan. Pertanyaan yang lebih dalam adalah apakah pertumbuhan itu adil, produktif, berkelanjutan, dan dipercaya.

Pertumbuhan tanpa keadilan akan menghasilkan ketegangan sosial. Keadilan tanpa pertumbuhan akan sulit dibiayai. Pertumbuhan dan keadilan tanpa kepercayaan publik akan kehilangan legitimasi. Karena itu, tiga pilar—pertumbuhan, keadilan, dan kepercayaan—harus dibangun bersama.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang didorong produktivitas, bukan hanya konsumsi dan belanja pemerintah. Indonesia membutuhkan keadilan yang memperluas akses, bukan hanya bantuan sosial. Indonesia membutuhkan kepercayaan publik yang dibangun melalui tata kelola, transparansi, hukum yang adil, data yang dapat dipercaya, dan APBN yang menghasilkan nilai publik.

Pada akhirnya, ekonomi Indonesia harus bergerak dari sekadar “tumbuh” menuju “bertumbuh secara bermakna”. Pertumbuhan bermakna adalah pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat kelas menengah, melindungi kelompok rentan, membuka akses UMKM, menjaga lingkungan, membangun manusia, dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada negara. Itulah fondasi ekonomi Indonesia yang kuat, adil, dan berkelanjutan.

Glossarium

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; instrumen fiskal utama pemerintah untuk mengelola pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan negara.

Daya Beli

Kemampuan masyarakat membeli barang dan jasa berdasarkan pendapatan dan tingkat harga.

Defisit Fiskal

Keadaan ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara dalam satu tahun anggaran.

Ekonomi Inklusif

Ekonomi yang membuka akses dan manfaat pertumbuhan bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok miskin, UMKM, pekerja informal, perempuan, pemuda, dan daerah tertinggal.

Gini Ratio

Ukuran ketimpangan distribusi pengeluaran atau pendapatan. Nilai 0 berarti sangat merata, sedangkan nilai 1 berarti sangat timpang.

Hilirisasi

Proses meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan lebih lanjut di dalam negeri.

Inflasi

Kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa.

Keadilan Ekonomi

Kondisi ketika hasil, akses, dan proses ekonomi berjalan secara lebih adil bagi seluruh masyarakat.

Kepercayaan Publik

Keyakinan masyarakat bahwa pemerintah, lembaga publik, data, hukum, dan kebijakan bekerja secara jujur, adil, efektif, dan untuk kepentingan umum.

Kelas Menengah Rentan

Kelompok masyarakat yang tidak lagi miskin, tetapi mudah turun kembali ke kondisi rentan akibat guncangan harga, kesehatan, pekerjaan, atau utang.

Kemiskinan

Kondisi ketika seseorang atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum menurut ukuran tertentu.

Kualitas Belanja Publik

Ukuran sejauh mana belanja pemerintah menghasilkan hasil nyata bagi masyarakat, bukan hanya terserap secara administratif.

Modal Manusia

Kualitas manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas, karakter, dan kemampuan adaptasi.

Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan output barang dan jasa suatu negara dalam periode tertentu, biasanya diukur melalui pertumbuhan PDB.

Produktivitas

Kemampuan menghasilkan output lebih besar atau lebih baik dari input yang digunakan.

Rupiah

Mata uang resmi Republik Indonesia dan salah satu indikator stabilitas makroekonomi nasional.

Subsidi Energi

Dukungan pemerintah untuk menahan harga energi seperti BBM, listrik, atau gas agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Tata Kelola

Sistem aturan, proses, institusi, dan nilai yang menentukan bagaimana kebijakan publik dirancang, dilaksanakan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; sektor usaha rakyat yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.

Aghion, P., & Howitt, P. (2009). *The economics of growth*. MIT Press.

Atkinson, A. B. (2015). *Inequality: What can be done?* Harvard University Press.

Autor, D. H. (2015). Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30.
<https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>

Badan Pusat Statistik. (2026). *Indonesia's economic growth in 2025 was 5.11 percent*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Indonesia's economic growth in Q1-2026 was 5.61 percent*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *The Gini Ratio in September 2025 was 0.363*. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026). *Unemployment rate was 4.68 percent and the average wage of employees was 3.29 million rupiah*. BPS.

Bank Indonesia. (2026). *BI-Rate naik 25 bps menjadi 5,75%*. Bank Indonesia.

Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103–S125.
<https://doi.org/10.1086/261726>

Besley, T., & Persson, T. (2011). *Pillars of prosperity: The political economics of development clusters*. Princeton University Press.

Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368.
<https://doi.org/10.1111/gove.12035>

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive*

Director for Indonesia. IMF Country Report No. 26/10.

<https://doi.org/10.5089/9798229035576.002>

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review*, 45(1), 1–28.

North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.

OECD. (2026). *OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1: Indonesia*. OECD Publishing.

Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. *Harvard Business Review*, 68(2), 73–93.

Ravallion, M. (2009). Do poorer countries have less capacity for redistribution? *Journal of Globalization and Development*, 1(2), Article 1.

<https://doi.org/10.2202/1948-1837.1105>

Rodrik, D. (2007). *One economics, many recipes: Globalization, institutions, and economic growth*. Princeton University Press.

Rodrik, D. (2008). The real exchange rate and economic growth. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2008(2), 365–412.

<https://doi.org/10.1353/eca.0.0020>

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality*. W. W. Norton.

Transparency International. (2026). *Corruption Perceptions Index 2025: Indonesia country profile*. Transparency International.

World Bank. (2026). *Indonesia Economic Prospects: Managing risks, unlocking productivity*. World Bank.

World Bank. (2026). *Indonesia overview*. World Bank.

*Rudy C Tarumingkeng: Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan, Keadilan, dan
Kepercayaan Publik*

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 24 June 2026. Author's
account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a388ad7-46fc-83ec-b5c6-bc3ad53631f7>